

**APBN SEBAGAI INSTRUMEN
KESEJAHTERAAN:
ANTARA DISIPLIN FISKAL DAN TUNTUTAN
PEMBANGUNAN**

Oleh
Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD
www.rudycr.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

Bogor, 2026

APBN

sebagai

INSTRUMEN KESEJAHTERAAN:

ANTARA DISIPLIN FISKAL DAN TUNTUTAN PEMBANGUNAN

APBN bukan sekadar angka, tetapi komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

APBN BERPERAN STRATEGIS UNTUK:



PERLINDUNGAN SOSIAL

Menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



PENGEMBANGAN SDM

Investasi pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan untuk masa depan.



INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS

Mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing bangsa.



TRANSFORMASI EKONOMI

Mendorong inovasi, hilirisasi, dan ekonomi berkelanjutan.



KEBERLANJUTAN FISKAL

Menjaga disiplin fiskal agar manfaat APBN dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

PRINSIP UTAMA APBN



DISIPLIN FISKAL

Defisit terkendali, utang berkelanjutan, dan pengelolaan risiko yang hati-hati.



EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Setiap rupiah belanja negara harus tepat sasaran dan memberi hasil nyata.



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.



KEADILAN DAN INKLUSI

Pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.



“

APBN yang sehat adalah fondasi ekonomi yang kuat, dan fondasi yang kuat adalah jalan menuju kesejahteraan rakyat. ”

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyct.com/cv.pdf



IBM ASMI
INSTITUT BISNIS DAN MULTIMEDIA



BERORIENTASI HASIL



BERPIHAK PADA RAKYAT



MENDORONG
PERTUMBUHAN



BERKELANJUTAN

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen paling konkret yang mempertemukan tujuan konstitusional negara, kapasitas fiskal, dan kebutuhan riil masyarakat. Artikel ini membahas APBN sebagai instrumen kesejahteraan dengan menempatkan disiplin fiskal dan tuntutan pembangunan bukan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua syarat yang harus dikelola secara simultan. Disiplin fiskal diperlukan untuk menjaga kesinambungan utang, kredibilitas kebijakan, ruang pembiayaan, dan stabilitas makroekonomi; sementara pembangunan memerlukan belanja publik yang cukup, tepat sasaran, berkualitas, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks Indonesia, APBN 2026 menetapkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit sekitar 2,68 persen terhadap PDB. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun, sementara defisit tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB, dengan surplus keseimbangan primer Rp85,1 triliun. Kinerja tersebut menunjukkan pentingnya melihat kesehatan fiskal tidak hanya dari besarnya defisit, tetapi juga dari kualitas pendapatan, komposisi belanja, efektivitas program, risiko pembiayaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Artikel ini mengembangkan kerangka analitis yang menghubungkan fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, dan transformasi APBN dengan isu produktivitas belanja, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, transfer ke daerah, perpajakan, utang, demografi, perubahan iklim, serta tata kelola berbasis hasil. Argumen utama artikel adalah bahwa APBN yang menyejahterakan adalah APBN yang disiplin sekaligus berani: disiplin pada batas fiskal, bukti, transparansi, dan prioritas; berani melakukan investasi publik yang menghasilkan kapabilitas manusia, produktivitas, ketahanan sosial, dan transformasi ekonomi.

Kata Kunci: APBN; kebijakan fiskal; kesejahteraan; disiplin fiskal; belanja publik; perpajakan; defisit; utang publik; perlindungan sosial; pembangunan berkelanjutan; Indonesia.

Ringkasan Konteks Fiskal Indonesia 2026

Indikator	APBN 2026 / Realisasi	Makna Analitis
Pendapatan negara (target APBN)	Rp3.153,6 triliun	Menentukan kapasitas negara membiayai pelayanan publik tanpa ketergantungan berlebihan pada utang.
Belanja negara (APBN)	Rp3.842,7 triliun	Mencerminkan skala intervensi negara untuk pelayanan, perlindungan sosial, investasi, dan pembangunan.
Defisit APBN	2,68% PDB	Tetap di bawah batas 3% PDB; disiplin perlu dinilai bersama kualitas belanja dan prospek pertumbuhan.
Pendapatan Semester I 2026	Rp1.459,4 triliun (46,3% target)	Menunjukkan penguatan penerimaan pada paruh pertama tahun 2026.
Defisit Semester I 2026	Rp196,5 triliun (0,76% PDB)	Posisi tengah tahun relatif terkendali; outlook tahunan tetap perlu diawasi.

Keseimbangan primer Semester I	Surplus Rp85,1 triliun	Mengindikasikan kemampuan menutup belanja non-bunga dari penerimaan pada periode tersebut.
Pertumbuhan ekonomi 2025	5,11%	Basis makro yang penting bagi penerimaan, kesempatan kerja, dan kapasitas fiskal.
Pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2026	5,61% y-on-y	Menunjukkan momentum awal tahun, dengan kontribusi konsumsi pemerintah yang kuat.
Kemiskinan September 2025	8,25%	Menjadi ukuran keluaran sosial yang perlu dihubungkan dengan efektivitas belanja dan targeting.
Gini ratio September 2025	0,363	Menggambarkan tantangan distribusi yang menuntut desain pajak-transfer lebih progresif dan efektif.

1. Pendahuluan: APBN sebagai Kontrak Sosial

Dalam negara modern, APBN tidak dapat dipahami hanya sebagai daftar penerimaan dan pengeluaran. APBN adalah keputusan politik-ekonomi yang menentukan siapa membayar, siapa menerima manfaat, sektor apa yang diprioritaskan, risiko apa yang ditanggung sekarang, dan beban apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, APBN adalah bentuk paling konkret dari kontrak sosial antara negara dan warga. Pajak dan penerimaan negara merupakan kontribusi kolektif; belanja publik adalah cara negara mengembalikan kontribusi tersebut dalam bentuk layanan, perlindungan, infrastruktur, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta kesempatan ekonomi. Ketika kontrak ini bekerja baik, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa kewajiban fiskal mereka memiliki makna. Ketika ia gagal, ketidakpercayaan muncul dalam bentuk penghindaran pajak, sinisme terhadap pemerintah, atau tuntutan populis yang justru dapat memperlemah ruang fiskal.

Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa 'sebesar-besarnya kemakmuran rakyat' memberikan orientasi normatif yang penting: kesehatan fiskal bukan tujuan akhir. Surplus, defisit rendah, atau rasio utang yang aman adalah kondisi yang membantu negara menjalankan mandat kesejahteraan, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan. Ukuran keberhasilan yang lebih substantif adalah kemampuan APBN meningkatkan kualitas hidup, memperluas kapabilitas warga, memperkuat produktivitas, mengurangi kerentanan, dan memperbaiki kesempatan antargenerasi.

Dalam praktik, pemerintah menghadapi dilema yang nyata. Tuntutan pembangunan terus berkembang: pembangunan sekolah dan rumah sakit, peningkatan kualitas guru dan tenaga kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan energi, pertahanan, digitalisasi, adaptasi iklim, perlindungan sosial, serta pelayanan publik di daerah tertinggal. Pada saat yang sama, sumber daya fiskal terbatas. Setiap rupiah yang dibelanjakan pada satu program berarti kesempatan yang hilang untuk program lain. Di sinilah disiplin fiskal memperoleh arti yang lebih dalam: bukan sekadar menahan pengeluaran, melainkan memaksa pemerintah melakukan prioritas berdasarkan manfaat sosial, efektivitas, dan keberlanjutan.

APBN 2026 memberi konteks yang relevan untuk perdebatan tersebut. Belanja negara ditetapkan lebih besar daripada pendapatan, sehingga defisit menjadi instrumen pembiayaan pembangunan. Defisit sendiri tidak identik dengan ketidakdisiplinan. Dalam ekonomi yang tumbuh, defisit dapat dibenarkan apabila membiayai investasi publik produktif, menjaga daya beli saat guncangan, atau mempercepat transformasi struktural.

Masalah muncul apabila defisit membiayai pengeluaran dengan manfaat rendah, kebocoran tinggi, kewajiban permanen yang tidak diimbangi sumber pendapatan, atau proyek yang tidak menghasilkan kapasitas ekonomi di masa depan. Karena itu, pertanyaan pokok bukan 'defisit atau tidak', melainkan 'defisit untuk apa, dengan kualitas apa, dan dengan risiko siapa'.

2. Landasan Teoretis: Fungsi Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi

Teori keuangan publik klasik menempatkan pemerintah pada tiga fungsi utama: alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi muncul karena pasar tidak selalu menghasilkan penyediaan barang publik, eksternalitas positif, atau investasi jangka panjang pada tingkat yang optimal. Pendidikan dasar, kesehatan preventif, jalan, sistem irigasi, riset dasar, keamanan, serta perlindungan lingkungan merupakan contoh bidang yang manfaat sosialnya lebih luas daripada manfaat privat. Melalui APBN, pemerintah dapat mengoreksi kegagalan pasar dan membangun fondasi produktivitas yang tidak selalu menarik bagi investor privat.

Fungsi distribusi berkaitan dengan kenyataan bahwa hasil pasar tidak otomatis adil atau sesuai dengan nilai sosial. Perbedaan akses pendidikan, lokasi, kesehatan, modal, jaringan sosial, dan warisan keluarga menghasilkan ketimpangan kesempatan maupun pendapatan. Pajak progresif, bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi yang dirancang baik, serta pelayanan publik universal dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Literatur tentang redistribusi menunjukkan bahwa efektivitas fiskal sangat tergantung pada struktur pajak dan transfer, bukan hanya pada besaran anggaran. Belanja yang besar tetapi salah sasaran dapat memiliki dampak redistributif yang lemah, sedangkan program yang lebih kecil namun terarah dapat menghasilkan pengurangan kemiskinan yang lebih besar.

Fungsi stabilisasi menjadi penting ketika ekonomi menghadapi siklus bisnis dan guncangan. Dalam resesi, penerimaan pajak melemah sementara kebutuhan perlindungan sosial meningkat. APBN dapat bertindak secara kontra-siklus melalui stimulus, bantuan tunai, subsidi temporer, atau percepatan belanja. Dalam periode inflasi tinggi atau ekonomi terlalu panas, kebijakan fiskal dapat lebih berhati-hati untuk menghindari tekanan permintaan. Indonesia memperoleh pengalaman penting selama pandemi COVID-19, ketika relaksasi fiskal memungkinkan pemerintah membiayai kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Pengalaman itu menunjukkan bahwa ruang fiskal yang dibangun sebelum krisis merupakan aset strategis.

Untuk negara berkembang, ketiga fungsi tersebut perlu ditambah fungsi keempat: transformasi struktural. APBN tidak hanya memperbaiki kegagalan pasar yang ada, tetapi dapat mengubah struktur ekonomi melalui investasi manusia, konektivitas, digitalisasi, industrialisasi, riset, dan transisi energi. Di sinilah belanja publik harus dinilai dari kemampuannya menciptakan kapasitas baru, bukan hanya menyerap anggaran. Transformasi menuntut perspektif multi-tahun karena hasil pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan riset sering baru terlihat setelah bertahun-tahun. Oleh sebab itu, sistem anggaran tahunan perlu ditopang kerangka fiskal jangka menengah dan evaluasi manfaat antargenerasi.

3. Disiplin Fiskal: Makna, Batas, dan Kesalahpahaman

Pokok persoalan dalam 3. disiplin fiskal: makna, batas, dan kesalahpahaman adalah bahwa disiplin fiskal bukan austeritas mekanis, melainkan konsistensi antara janji kebijakan, sumber pembiayaan, risiko, dan kapasitas ekonomi. Dalam praktik penganggaran, isu aturan defisit 3 persen PDB, keseimbangan primer, dan rasio utang dan biaya bunga saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi

pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, kredibilitas pasar dan risiko mata uang dan suku bunga menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan aturan defisit 3 persen PDB atau keseimbangan primer seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan *spending review*, evaluasi program, *cost-effectiveness analysis*, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki *opportunity cost*: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. kontinjensi BUMN dan PPP dan efektivitas dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah aturan defisit 3 persen PDB, keseimbangan primer, rasio utang dan biaya bunga, dan kredibilitas pasar secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 3. disiplin fiskal: makna, batas, dan kesalahpahaman memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada aturan defisit 3 persen PDB akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada keseimbangan primer; pilihan mengenai rasio utang dan biaya bunga akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara kredibilitas pasar serta risiko mata uang dan suku bunga menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami *trade-off*, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

4. APBN 2026: Membaca Postur, Realisasi, dan Outlook

Pokok persoalan dalam 4. apbn 2026: membaca postur, realisasi, dan outlook adalah bahwa postur APBN perlu dibaca sebagai satu sistem, bukan angka-angka yang berdiri sendiri. Dalam praktik penganggaran, isu pendapatan Rp3.153,6 triliun, belanja Rp3.842,7 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, realisasi pendapatan Semester I Rp1.459,4 triliun dan defisit Semester I 0,76 persen PDB menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan pendapatan Rp3.153,6 triliun atau belanja Rp3.842,7 triliun seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. outlook defisit sekitar 2,85 persen PDB dan efektivitas dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah pendapatan Rp3.153,6 triliun, belanja Rp3.842,7 triliun, defisit 2,68 persen PDB, dan realisasi pendapatan Semester I Rp1.459,4 triliun secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 4. apbn 2026: membaca postur, realisasi, dan outlook memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada pendapatan Rp3.153,6 triliun akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada belanja Rp3.842,7 triliun; pilihan mengenai defisit 2,68 persen PDB akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara realisasi pendapatan Semester I Rp1.459,4 triliun serta defisit Semester I 0,76 persen PDB menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu,

keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

Kasus APBN 2026 memberikan ilustrasi bahwa angka tengah tahun harus dibaca bersama pola musiman dan outlook. Hingga Semester I 2026, pendapatan negara tercatat Rp1.459,4 triliun atau 46,3 persen target. Defisit tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen PDB dan keseimbangan primer surplus Rp85,1 triliun. Namun pemerintah pada pertengahan tahun memproyeksikan outlook defisit sekitar 2,85 persen PDB, dengan pendapatan sekitar Rp3.208,1 triliun dan belanja sekitar Rp3.942,4 triliun. Perbedaan antara posisi semester dan proyeksi akhir tahun menunjukkan pentingnya memahami profil pencairan belanja, penerimaan musiman, restitusi pajak, subsidi, transfer, dan kebutuhan pembiayaan. Dengan demikian, penilaian disiplin fiskal tidak cukup dilakukan dari snapshot satu bulan atau satu semester.

5. Pendapatan Negara dan Tantangan Tax Ratio

Pokok persoalan dalam 5. pendapatan negara dan tantangan tax ratio adalah bahwa kemandirian fiskal pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan negara membangun basis penerimaan yang luas, adil, dan tidak menghambat produktivitas. Dalam praktik penganggaran, isu perluasan basis pajak, kepatuhan sukarela, dan administrasi digital saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, ekonomi informal dan insentif pajak menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan perluasan basis pajak atau kepatuhan sukarela seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. PNPB sumber daya alam dan keadilan horizontal dan vertikal dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau

kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah perluasan basis pajak, kepatuhan sukarela, administrasi digital, dan ekonomi informal secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 5. pendapatan negara dan tantangan tax ratio memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada perluasan basis pajak akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada kepatuhan sukarela; pilihan mengenai administrasi digital akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara ekonomi informal serta insentif pajak menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

6. Kualitas Belanja: Dari Spending More menuju Spending Better

Pokok persoalan dalam 6. kualitas belanja: dari spending more menuju spending better adalah bahwa besarnya anggaran tidak otomatis menghasilkan manfaat apabila desain, eksekusi, dan evaluasinya lemah. Dalam praktik penganggaran, isu efisiensi alokatif, efisiensi teknis, dan outcome-based budgeting saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, evaluasi ex ante dan ex post dan pengadaan publik menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan efisiensi alokatif atau efisiensi teknis seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. fragmentasi program dan belanja modal dan pemeliharaan dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah efisiensi alokatif, efisiensi teknis, outcome-based budgeting, dan evaluasi ex ante dan ex post secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 6. kualitas belanja: dari spending more menuju spending better memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada efisiensi alokatif akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada efisiensi teknis; pilihan mengenai outcome-based budgeting akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara evaluasi ex ante dan ex post serta pengadaan publik menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

7. Perlindungan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan

Pokok persoalan dalam 7. perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan adalah bahwa perlindungan sosial adalah fungsi inti APBN karena kemiskinan tidak hanya merupakan masalah pendapatan, tetapi juga kerentanan terhadap guncangan. Dalam praktik penganggaran, isu bantuan tunai, jaminan sosial, dan registri sosial saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, targeting dan exclusion error dan graduasi penerima menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian

atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan bantuan tunai atau jaminan sosial seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. Respons terhadap bencana dan kemiskinan 8,25 persen dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah bantuan tunai, jaminan sosial, registri sosial, dan targeting dan exclusion error secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 7. perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada bantuan tunai akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada jaminan sosial; pilihan mengenai registri sosial akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara targeting dan exclusion error serta graduasi penerima menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan September 2025 sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang, sedangkan gini ratio berada pada 0,363. Angka ini menandai kemajuan, tetapi juga memperlihatkan bahwa jutaan rumah tangga masih berada dekat garis kemiskinan dan mudah jatuh kembali ketika terkena sakit, kehilangan pekerjaan, bencana, atau lonjakan harga pangan. Karena itu, APBN memerlukan perlindungan sosial adaptif: basis data penerima yang mutakhir, mekanisme pembayaran yang cepat, serta kemampuan memperluas cakupan secara temporer ketika guncangan terjadi. Perlindungan sosial juga perlu dihubungkan dengan kebijakan pekerjaan, pelatihan, layanan kesehatan, dan pendidikan agar transfer tidak berhenti sebagai bantuan konsumsi, tetapi menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi.

8. Pendidikan sebagai Investasi Fiskal Antargenerasi

Pokok persoalan dalam 8. pendidikan sebagai investasi fiskal antargenerasi adalah bahwa belanja pendidikan harus dilihat sebagai investasi pada produktivitas, mobilitas sosial, dan kapasitas adaptasi ekonomi. Dalam praktik penganggaran, isu amanat 20 persen, kualitas guru, dan pembelajaran dasar saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, pendidikan tinggi dan TVET dan reskilling menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan amanat 20 persen atau kualitas guru seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan *spending review*, evaluasi program, *cost-effectiveness analysis*, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki *opportunity cost*: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. AI dan literasi digital dan kesenjangan daerah dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah amanat 20 persen, kualitas guru, pembelajaran dasar, dan pendidikan tinggi secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 8. pendidikan sebagai investasi fiskal antargenerasi memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada amanat 20 persen akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada kualitas guru; pilihan mengenai pembelajaran dasar akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara pendidikan tinggi serta TVET dan reskilling menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur

mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

Dalam pendidikan, masalah utama sering bukan semata besaran alokasi, melainkan konversi anggaran menjadi kualitas belajar. Belanja untuk gedung, perangkat digital, atau program pelatihan perlu dibaca bersama kualitas guru, kehadiran siswa, literasi-numerasi, relevansi kurikulum, dan transisi ke pekerjaan. Di era AI, investasi pada kompetensi dasar justru semakin penting karena teknologi memperbesar nilai kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, literasi data, dan pembelajaran sepanjang hayat. APBN perlu mendukung ekosistem yang memungkinkan sekolah dan perguruan tinggi menggunakan teknologi sebagai alat peningkatan mutu, bukan sekadar proyek pengadaan.

9. Kesehatan, Human Capital, dan Ketahanan Sistem

Pokok persoalan dalam 9. kesehatan, human capital, dan ketahanan sistem adalah bahwa kesehatan publik menentukan produktivitas sekaligus ketahanan masyarakat terhadap risiko biologis dan ekonomi. Dalam praktik penganggaran, isu JKN, layanan primer, dan preventif-promotif saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, stunting dan tenaga kesehatan menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan JKN atau layanan primer seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. digital health dan kesiapsiagaan pandemi dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah JKN, layanan primer, preventif-promotif, dan stunting secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 9. kesehatan, human capital, dan ketahanan sistem memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada JKN akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada layanan primer; pilihan mengenai preventif-promotif akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara stunting serta tenaga kesehatan menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

10. Infrastruktur dan Produktivitas Jangka Panjang

Pokok persoalan dalam 10. infrastruktur dan produktivitas jangka panjang adalah bahwa infrastruktur bernilai fiskal apabila menurunkan biaya ekonomi dan membuka produktivitas, bukan sekadar menghasilkan aset fisik. Dalam praktik penganggaran, isu jalan dan pelabuhan, air dan sanitasi, dan irigasi saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, konektivitas digital dan maintenance backlog menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan jalan dan pelabuhan atau air dan sanitasi seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. analisis biaya-manfaat dan PPP dan value for money dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban

pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah jalan dan pelabuhan, air dan sanitasi, irigasi, dan konektivitas digital secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 10. infrastruktur dan produktivitas jangka panjang memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada jalan dan pelabuhan akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada air dan sanitasi; pilihan mengenai irigasi akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara konektivitas digital serta maintenance backlog menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

11. Subsidi Energi, Pangan, dan Dilema Ketepatan Sasaran

Pokok persoalan dalam 11. subsidi energi, pangan, dan dilema ketepatan sasaran adalah bahwa subsidi dapat menjadi alat stabilisasi sosial, tetapi desain berbasis harga sering menimbulkan kebocoran dan manfaat tidak proporsional bagi kelompok mampu. Dalam praktik penganggaran, isu subsidi energi, kompensasi, dan targeting penerima saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, inflasi pangan dan ketahanan energi menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan subsidi energi atau kompensasi seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip

ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. transisi hijau dan reformasi bertahap dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah subsidi energi, kompensasi, targeting penerima, dan inflasi pangan secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 11. subsidi energi, pangan, dan dilema ketepatan sasaran memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada subsidi energi akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada kompensasi; pilihan mengenai targeting penerima akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara inflasi pangan serta ketahanan energi menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

12. Transfer ke Daerah dan Keadilan Antarwilayah

Pokok persoalan dalam 12. transfer ke daerah dan keadilan antarwilayah adalah bahwa desentralisasi fiskal harus mempertemukan otonomi lokal dengan standar pelayanan minimum dan pemerataan nasional. Dalam praktik penganggaran, isu DAU, DAK, dan DBH saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, insentif fiskal dan kapasitas fiskal daerah menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan

outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan DAU atau DAK seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. kualitas APBD dan ketimpangan regional dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah DAU, DAK, DBH, dan insentif fiskal secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 12. transfer ke daerah dan keadilan antarwilayah memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada DAU akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada DAK; pilihan mengenai DBH akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara insentif fiskal serta kapasitas fiskal daerah menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

13. Utang Publik: Antara Leverage Pembangunan dan Beban Masa Depan

Pokok persoalan dalam 13. utang publik: antara leverage pembangunan dan beban masa depan adalah bahwa utang adalah instrumen intertemporal yang dapat mempercepat pembangunan apabila manfaat proyek melampaui biaya pembiayaan. Dalam praktik penganggaran, isu maturity profile, interest-to-revenue, dan risiko refinancing saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer,

subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, utang valas dan pasar SBN domestik menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan maturity profile atau interest-to-revenue seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. pembiayaan hijau dan keadilan antargenerasi dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah maturity profile, interest-to-revenue, risiko refinancing, dan utang valas secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 13. utang publik: antara leverage pembangunan dan beban masa depan memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada maturity profile akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada interest-to-revenue; pilihan mengenai risiko refinancing akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara utang valas serta pasar SBN domestik menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

Kriteria sederhana untuk membedakan utang produktif dan tidak produktif adalah hubungan antara biaya utang dan kapasitas yang diciptakannya. Utang untuk sistem air bersih, pelabuhan yang menurunkan biaya logistik, atau pendidikan yang meningkatkan produktivitas dapat memperluas basis ekonomi dan penerimaan di masa depan. Sebaliknya, utang untuk menutup pengeluaran rutin yang tidak disertai reformasi dapat menimbulkan ketergantungan. Meski demikian, klasifikasi ini tidak selalu hitam-putih: belanja kesehatan saat krisis mungkin tampak konsumtif, tetapi mencegah kerugian ekonomi yang jauh lebih besar. Karena itu,

evaluasi utang harus mempertimbangkan manfaat langsung, manfaat pencegahan, distribusi manfaat, dan risiko makro.

14. APBN sebagai Shock Absorber

Pokok persoalan dalam 14. apbn sebagai shock absorber adalah bahwa ketahanan fiskal diuji bukan ketika keadaan normal, tetapi ketika guncangan menekan pendapatan, harga, pekerjaan, dan kebutuhan belanja secara serentak. Dalam praktik penganggaran, isu pandemi, geopolitik, dan harga komoditas saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, bencana alam dan inflasi pangan menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan pandemi atau geopolitik seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. automatic stabilizers dan contingency reserve dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah pandemi, geopolitik, harga komoditas, dan bencana alam secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 14. apbn sebagai shock absorber memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada pandemi akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada geopolitik; pilihan mengenai harga komoditas akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara

bencana alam serta inflasi pangan menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

15. Ekonomi Hijau, Perubahan Iklim, dan Risiko Fiskal

Pokok persoalan dalam 15. ekonomi hijau, perubahan iklim, dan risiko fiskal adalah bahwa perubahan iklim mengubah struktur risiko APBN karena bencana, kesehatan, pangan, energi, dan infrastruktur memiliki biaya fiskal yang makin besar. Dalam praktik penganggaran, isu climate budget tagging, adaptasi, dan mitigasi saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, transisi energi dan carbon pricing menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan climate budget tagging atau adaptasi seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. green sukuk dan just transition dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah climate budget tagging, adaptasi, mitigasi, dan transisi energi secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar

dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 15. ekonomi hijau, perubahan iklim, dan risiko fiskal memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada climate budget tagging akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada adaptasi; pilihan mengenai mitigasi akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara transisi energi serta carbon pricing menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

16. Demografi, Penuaan Penduduk, dan Kewajiban Jangka Panjang

Pokok persoalan dalam 16. demografi, penuaan penduduk, dan kewajiban jangka panjang adalah bahwa bonus demografi hanya menghasilkan dividen apabila APBN mengubah populasi usia kerja menjadi tenaga produktif yang sehat dan terampil. Dalam praktik penganggaran, isu lapangan kerja, pensiun, dan kesehatan lansia saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, fertilitas dan human capital menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan lapangan kerja atau pensiun seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. care economy dan aktuarial jangka panjang dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah lapangan kerja, pensiun, kesehatan lansia, dan fertilitas secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 16. demografi, penuaan penduduk, dan kewajiban jangka panjang memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada lapangan kerja akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada pensiun; pilihan mengenai kesehatan lansia akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara fertilitas serta human capital menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

17. Digitalisasi Fiskal, AI, dan Pemerintahan Berbasis Data

Pokok persoalan dalam 17. digitalisasi fiskal, ai, dan pemerintahan berbasis data adalah bahwa teknologi digital dapat meningkatkan penerimaan dan kualitas belanja apabila diikuti tata kelola data, interoperabilitas, keamanan, dan etika algoritmik. Dalam praktik penganggaran, isu Coretax dan administrasi, single source of truth, dan fraud analytics saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, AI untuk targeting dan privacy menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan Coretax dan administrasi atau single source of truth seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. cybersecurity dan digital public infrastructure dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca

yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah Coretax dan administrasi, single source of truth, fraud analytics, dan AI untuk targeting secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 17. digitalisasi fiskal, ai, dan pemerintahan berbasis data memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada Coretax dan administrasi akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada single source of truth; pilihan mengenai fraud analytics akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara AI untuk targeting serta privacy menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

Pemanfaatan AI dalam fiskal membuka potensi besar untuk deteksi anomali pajak, estimasi risiko kepatuhan, verifikasi penerima bantuan, identifikasi fraud pengadaan, dan evaluasi pola belanja. Namun AI tidak boleh mengubah keputusan publik menjadi kotak hitam. Model yang digunakan untuk menentukan risiko wajib pajak atau kelayakan penerima bantuan harus dapat diaudit, dijelaskan, dan dilengkapi mekanisme keberatan. Kualitas data menjadi prasyarat utama; algoritma yang canggih pada data yang bias hanya akan menghasilkan ketidakadilan yang lebih cepat dan lebih sulit terlihat.

18. Tata Kelola, Transparansi, dan Akuntabilitas

Pokok persoalan dalam 18. tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas adalah bahwa kepercayaan fiskal dibangun ketika masyarakat dapat menelusuri hubungan antara pajak, anggaran, output, dan hasil pembangunan. Dalam praktik penganggaran, isu open budget, audit BPK, dan pengawasan DPR saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, pengadaan dan conflict of interest menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan open budget atau audit BPK seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. partisipasi publik dan evaluasi kinerja dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah open budget, audit BPK, pengawasan DPR, dan pengadaan secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 18. tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada open budget akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada audit BPK; pilihan mengenai pengawasan DPR akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara pengadaan serta conflict of interest menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

19. Politik Anggaran dan Risiko Populisme Fiskal

Pokok persoalan dalam 19. politik anggaran dan risiko populisme fiskal adalah bahwa APBN selalu merupakan hasil negosiasi politik sehingga kualitas fiskal bergantung pada kemampuan institusi menahan bias jangka pendek. Dalam praktik penganggaran, isu electoral cycle, earmarking, dan program populis saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi

dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, rent seeking dan komitmen multi-tahun menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan electoral cycle atau earmarking seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. independent fiscal institutions dan evidence-based policy dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah electoral cycle, earmarking, program populis, dan rent seeking secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 19. politik anggaran dan risiko populisme fiskal memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada electoral cycle akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada earmarking; pilihan mengenai program populis akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara rent seeking serta komitmen multi-tahun menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

20. Kerangka APBN yang Menyejahterakan: Prinsip dan Agenda Reformasi

Pokok persoalan dalam 20. kerangka apbn yang menyejahterakan: prinsip dan agenda reformasi adalah bahwa reformasi fiskal perlu memindahkan pusat perhatian dari kepatuhan input menuju penciptaan outcome dan nilai publik. Dalam praktik penganggaran, isu prioritas nasional terbatas, spending review, dan sunset clause saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, medium-term expenditure framework dan fiscal risk statement menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan prioritas nasional terbatas atau spending review seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. targeting dinamis dan evaluasi dampak dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah prioritas nasional terbatas, spending review, sunset clause, dan medium-term expenditure framework secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 20. kerangka apbn yang menyejahterakan: prinsip dan agenda reformasi memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada prioritas nasional terbatas akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada spending review; pilihan mengenai sunset clause akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara medium-term expenditure framework serta fiscal risk statement menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai

narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

21. Skenario 2030: Menjaga Ruang Fiskal untuk Indonesia Maju

Pokok persoalan dalam 21. skenario 2030: menjaga ruang fiskal untuk Indonesia maju adalah bahwa keputusan fiskal hari ini membentuk ruang kebijakan lima sampai sepuluh tahun ke depan. Dalam praktik penganggaran, isu pertumbuhan produktivitas, tax ratio, dan biaya bunga saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, human capital dan urbanisasi menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan pertumbuhan produktivitas atau tax ratio seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. transisi energi dan ketidakpastian global dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah pertumbuhan produktivitas, tax ratio, biaya bunga, dan human capital secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 21. skenario 2030: menjaga ruang fiskal untuk Indonesia maju memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada pertumbuhan produktivitas akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada tax ratio; pilihan mengenai biaya bunga akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara human capital serta urbanisasi menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

22. Penutup: Disiplin yang Melayani Pembangunan

Pokok persoalan dalam 22. penutup: disiplin yang melayani pembangunan adalah bahwa disiplin fiskal dan pembangunan bukan dua kutub yang harus dipilih salah satu. Dalam praktik penganggaran, isu kredibilitas, prioritas, dan keadilan saling berhubungan. Kebijakan yang hanya mengejar satu indikator sering menghasilkan trade-off yang tidak terlihat pada saat keputusan diambil. Misalnya, penghematan jangka pendek dapat memperbaiki angka defisit tetapi menimbulkan biaya yang lebih besar apabila mengurangi pemeliharaan aset, kualitas layanan dasar, atau investasi manusia. Sebaliknya, ekspansi belanja yang tidak disertai indikator hasil dan mekanisme evaluasi dapat menciptakan kewajiban permanen yang menekan ruang fiskal. Karena itu, analisis yang memadai perlu membedakan antara belanja konsumtif yang berulang, belanja investasi, transfer, subsidi, dan pembiayaan, serta menilai siapa penerima manfaat akhirnya. Perspektif ini juga menuntut perhatian terhadap distribusi manfaat lintas kelompok pendapatan, wilayah, gender, dan generasi.

Dari sudut manajemen publik, produktivitas dan ketahanan menentukan apakah kebijakan benar-benar menghasilkan nilai publik. Anggaran adalah input; keluaran adalah layanan atau aset; sedangkan outcome adalah perubahan keadaan masyarakat. Ketiga lapis ini sering tercampur. Kementerian atau pemerintah daerah dapat melaporkan penyerapan anggaran tinggi tanpa bukti bahwa kualitas layanan meningkat. Karena itu, keberhasilan kredibilitas atau prioritas seharusnya diukur melalui indikator hasil yang dapat diverifikasi. Pendekatan spending review, evaluasi program, cost-effectiveness analysis, dan pengukuran manfaat sosial dapat membantu membedakan program yang layak diperbesar, diperbaiki, digabung, atau dihentikan. Prinsip ini penting karena ruang fiskal memiliki opportunity cost: mempertahankan program yang tidak efektif berarti mengorbankan program lain yang mungkin memiliki dampak kesejahteraan lebih besar.

Dimensi risiko juga tidak boleh diabaikan. akuntabilitas dan antargenerasi dapat menciptakan tekanan yang baru terlihat beberapa tahun kemudian. Pemerintah karena itu memerlukan pendekatan neraca yang lebih luas, tidak hanya arus kas tahunan. Aset publik, kewajiban utang, kewajiban pensiun, jaminan pemerintah, kontrak kerja sama, risiko BUMN, dan potensi biaya bencana perlu dipetakan secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah dapat menguji ketahanan APBN terhadap skenario pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas, atau kebutuhan belanja darurat. Dengan cara ini, disiplin tidak diterjemahkan sebagai kekakuan, melainkan kemampuan untuk mempersiapkan ruang respons sebelum krisis datang.

Implikasi kebijakan dari pembahasan ini adalah kebutuhan akan urutan reformasi yang realistis. Pemerintah tidak selalu dapat mengubah kredibilitas, prioritas, keadilan, dan produktivitas secara serentak. Reformasi yang baik dimulai dari data yang dapat dipercaya, tujuan yang jelas, penetapan baseline, dan pilihan instrumen yang konsisten. Setelah itu diperlukan pelaksanaan yang mampu mengoordinasikan kementerian, pemerintah

daerah, BUMN, dan pelaku swasta. Tahap terakhir adalah evaluasi serta koreksi. Siklus ini membuat APBN menjadi sistem pembelajaran, bukan ritual tahunan. Dalam konteks Indonesia yang besar dan majemuk, fleksibilitas implementasi perlu disandingkan dengan standar nasional, transparansi, dan akuntabilitas sehingga variasi lokal tidak berubah menjadi ketimpangan mutu pelayanan.

Secara substantif, pembahasan 22. penutup: disiplin yang melayani pembangunan memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal selalu mengandung pilihan nilai. Prioritas pada kredibilitas akan berbeda konsekuensinya dengan prioritas pada prioritas; pilihan mengenai keadilan akan memengaruhi distribusi manfaat dan risiko; sementara produktivitas serta ketahanan menentukan keberlanjutan pelaksanaannya. Oleh karena itu, keputusan anggaran perlu disertai narasi publik yang jujur mengenai tujuan, biaya, penerima manfaat, dan risiko. Transparansi semacam ini penting bukan hanya bagi akuntabilitas demokratis, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas keputusan. Ketika masyarakat memahami trade-off, ruang bagi kebijakan yang konsisten dan berjangka panjang menjadi lebih besar. APBN yang berorientasi kesejahteraan pada akhirnya bukan APBN yang menjanjikan semua hal kepada semua orang, melainkan APBN yang mampu memilih secara adil, menjelaskan pilihannya, dan membuktikan hasilnya.

23. Matriks Prinsip APBN Berorientasi Kesejahteraan

Prinsip	Pertanyaan Kunci	Indikator Contoh	Risiko bila Diabaikan
Kecukupan	Apakah sumber daya cukup untuk layanan dasar dan prioritas?	tax ratio; revenue-to-GDP; belanja per kapita	underfunding dan penurunan kualitas layanan
Efisiensi	Apakah output maksimal dihasilkan dari setiap rupiah?	unit cost; procurement savings; completion rate	pemborosan dan crowding-out
Efektivitas	Apakah program mengubah outcome masyarakat?	learning outcome; mortality; poverty exit	penyerapan tinggi tanpa dampak
Keadilan	Siapa yang membayar dan siapa yang menerima?	benefit incidence; tax progressivity; Gini	regresivitas dan ketidakpercayaan
Keberlanjutan	Apakah kebijakan dapat dibiayai lintas tahun?	defisit; debt service; primary balance	fiscal stress dan beban generasi mendatang
Ketahanan	Apakah APBN mampu merespons guncangan?	buffer; contingency; maturity profile	respons terlambat saat krisis
Transparansi	Dapatkah publik menelusuri uang dan hasilnya?	open budget; audit follow-up	korupsi, patronase, legitimasi lemah
Transformasi	Apakah belanja membangun kapasitas ekonomi masa depan?	TFP; human capital; green investment	stagnasi struktural

24. Rekomendasi Kebijakan

Pertama, memperkuat basis penerimaan tanpa membebani produktivitas. Reformasi harus menekankan perluasan basis, kepatuhan, simplifikasi, interoperabilitas data, serta pengurangan pengecualian yang tidak efektif. Peningkatan penerimaan yang berkelanjutan lebih baik daripada perubahan tarif yang sering dan sulit diprediksi.

Kedua, menginstitusikan spending review tahunan dan multi-tahun. Setiap program besar perlu memiliki baseline, indikator hasil, dan evaluasi berkala. Program yang tidak efektif harus diperbaiki, digabung, atau dihentikan sehingga ruang fiskal dapat dialihkan kepada prioritas yang lebih produktif.

Ketiga, melindungi belanja pembentuk human capital. Pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, dan perlindungan sosial yang berkualitas memberikan dampak lintas generasi. Efisiensi pada bidang ini harus diarahkan pada perbaikan cara belanja, bukan pemotongan buta.

Keempat, memperkuat manajemen risiko fiskal. Pemerintah perlu mengintegrasikan risiko utang, BUMN, PPP, pensiun, bencana, iklim, dan komoditas ke dalam fiscal risk statement yang transparan dan stress test rutin.

Kelima, mengembangkan subsidi yang lebih tepat sasaran. Jika tujuan kebijakan adalah melindungi kelompok rentan, dukungan berbasis penerima umumnya lebih adil dibanding subsidi harga universal. Reformasi perlu bertahap dan disertai kompensasi yang kredibel.

Keenam, memperkuat kualitas transfer ke daerah. Desain transfer harus memberi insentif pada kualitas layanan, pemeliharaan aset, inovasi, dan pencapaian outcome, sambil tetap menjamin kapasitas minimum daerah dengan basis fiskal lemah.

Ketujuh, membangun infrastruktur data fiskal dan sosial yang terpadu. Data penerimaan, belanja, aset, pengadaan, penerima manfaat, dan outcome perlu dapat dihubungkan untuk analitik kebijakan. AI dapat membantu, tetapi governance, privasi, dan audit algoritma harus menjadi bagian desain sejak awal.

Kedelapan, memperkuat komunikasi publik mengenai trade-off. Pemerintah sebaiknya tidak hanya mengumumkan besaran program, tetapi menjelaskan tujuan, biaya, alternatif, dan hasil. Literasi fiskal publik memperkuat legitimasi untuk reformasi yang sulit namun perlu.

Kesembilan, menerapkan perspektif antargenerasi. Setiap kebijakan besar perlu dinilai dampaknya terhadap kewajiban masa depan, kualitas lingkungan, aset publik, serta kapasitas generasi berikutnya untuk membiayai layanan negara.

Kesepuluh, menjaga disiplin sebagai alat pembangunan. Batas defisit, kehati-hatian utang, dan transparansi tidak boleh diperlakukan sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, disiplin harus menciptakan ruang agar negara dapat berinvestasi secara konsisten pada prioritas yang benar.

25. Studi Kasus Analitis: Ketika Efisiensi Bertemu Kualitas Pelayanan

Perdebatan mengenai efisiensi anggaran sering disederhanakan menjadi pertanyaan apakah belanja harus dipotong atau dipertahankan. Padahal, efisiensi yang sesungguhnya adalah kemampuan menghasilkan manfaat yang sama atau lebih besar dengan sumber daya yang lebih tepat. Bayangkan sebuah program layanan kesehatan primer yang memiliki anggaran administrasi, perjalanan dinas, pengadaan alat, obat, tenaga kontrak, dan sistem informasi. Pemotongan seragam sebesar sepuluh persen pada semua komponen mungkin terlihat adil, tetapi dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak adil. Komponen yang sudah efisien ikut dipotong, sementara sumber pemborosan yang struktural tetap ada. Pendekatan yang lebih baik adalah memetakan rantai nilai pelayanan: aktivitas mana yang langsung memengaruhi akses pasien, kualitas diagnosis, ketersediaan obat, waktu tunggu, dan pencegahan penyakit. Penghematan kemudian diarahkan pada duplikasi, harga pengadaan, proses manual, atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan outcome. Dengan cara ini, disiplin fiskal menjadi instrumen manajerial, bukan tindakan akuntansi semata.

Kasus serupa terjadi pada pendidikan. Sekolah dapat memiliki anggaran yang cukup tetapi hasil belajar rendah karena dana tidak diarahkan pada intervensi yang paling menentukan. Pengadaan perangkat digital, misalnya, tidak otomatis meningkatkan pembelajaran apabila konektivitas buruk, guru tidak mendapatkan pendampingan, konten tidak relevan, dan perangkat tidak dipelihara. Dalam kondisi seperti itu, efisiensi bukan berarti mengurangi investasi teknologi, melainkan merancang ekosistem pemanfaatannya. Setiap komponen anggaran harus dikaitkan dengan teori perubahan yang jelas: input menghasilkan aktivitas, aktivitas menghasilkan output, dan output berkontribusi pada outcome. Jika rantai tersebut tidak dapat dijelaskan, program perlu dipertanyakan sebelum anggaran diperbesar.

Dari perspektif organisasi, spending review perlu melibatkan unit pelaksana, bukan hanya unit anggaran. Informasi mengenai pemborosan sering berada di garis depan: petugas kesehatan mengetahui proses mana yang berulang, guru mengetahui pelatihan mana yang tidak berguna, pemerintah daerah mengetahui aturan mana yang memperlambat pengadaan, dan masyarakat mengetahui layanan mana yang tidak sampai kepada mereka. Karena itu, efisiensi yang berkelanjutan memerlukan kombinasi audit data, evaluasi program, dan pembelajaran dari pelaksana. Pendekatan partisipatif juga mengurangi risiko bahwa penghematan hanya memindahkan biaya dari APBN kepada rumah tangga, misalnya ketika pengurangan anggaran layanan publik memaksa masyarakat membeli layanan privat dengan harga lebih tinggi.

Prinsip akhirnya adalah 'protect outcomes, challenge costs'. Outcome yang penting—keselamatan pasien, hasil belajar, akses air, perlindungan kelompok miskin—harus dilindungi, sedangkan struktur biaya harus terus diuji. Dengan prinsip ini, pemerintah dapat melakukan konsolidasi fiskal tanpa kehilangan orientasi kesejahteraan. Efisiensi menjadi proses inovasi: digitalisasi proses, konsolidasi pengadaan, standarisasi harga, pemanfaatan data, pencegahan fraud, serta redesain organisasi. Hasil penghematan sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai dana yang hilang dari sektor terkait; sebagian dapat dikembalikan sebagai insentif bagi unit yang berhasil meningkatkan produktivitas. Mekanisme semacam ini membangun budaya bahwa efisiensi bukan ancaman, melainkan cara memperluas dampak pelayanan.

26. Studi Kasus Analitis: Reformasi Subsidi dan Kepercayaan Publik

Reformasi subsidi adalah salah satu contoh paling jelas mengenai pertemuan antara ekonomi, politik, dan administrasi. Secara ekonomi, subsidi harga yang universal sering tidak efisien karena kelompok berpendapatan tinggi mengonsumsi lebih banyak energi atau barang yang disubsidi sehingga menerima manfaat nominal lebih besar. Secara fiskal, subsidi juga dapat meningkat drastis ketika harga komoditas atau nilai tukar berubah. Namun secara sosial-politik, pengurangan subsidi dapat memicu inflasi, menurunkan daya beli, dan menimbulkan persepsi bahwa negara menarik perlindungan. Karena itu, reformasi yang hanya menghitung penghematan anggaran tanpa memetakan dampak distribusinya berisiko gagal.

Pendekatan yang lebih kuat adalah mengubah subsidi dari perlindungan harga menjadi perlindungan rumah tangga. Negara dapat mempertahankan dukungan bagi kelompok rentan melalui transfer yang lebih terarah, sementara harga secara bertahap mendekati biaya ekonomi. Namun mekanisme ini hanya efektif jika data penerima cukup baik, saluran pembayaran andal, dan nilai kompensasi sesuai dengan dampak kenaikan harga. Kesalahan eksklusi—rumah tangga miskin yang tidak menerima bantuan—dapat menggerus legitimasi reformasi. Sebaliknya, kesalahan inklusi mengurangi efisiensi fiskal. Oleh karena itu, pembaruan registri sosial, interoperabilitas data, dan mekanisme pengaduan harus diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan subsidi, bukan sekadar proyek administrasi.

Dimensi waktu juga penting. Reformasi harga yang dilakukan terlalu cepat pada saat inflasi pangan tinggi, pertumbuhan lemah, atau pengangguran meningkat dapat memperbesar biaya sosial. Pemerintah perlu

memilih sequencing: memperbaiki data dan transfer terlebih dahulu, mengomunikasikan tujuan reformasi, menjalankan kompensasi, kemudian menyesuaikan harga secara bertahap. Sebagian penghematan idealnya dialihkan secara terlihat ke transportasi umum, kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial sehingga masyarakat dapat melihat pertukaran kebijakan. Transparansi mengenai penggunaan dana penghematan berperan besar dalam membangun kepercayaan.

Dalam jangka panjang, reformasi subsidi juga terkait dengan transformasi energi. Harga energi yang terlalu rendah mengurangi insentif efisiensi dan investasi pada teknologi bersih. Tetapi transisi hijau yang adil tidak dapat membebankan biaya terutama kepada kelompok miskin. APBN karena itu harus menggabungkan sinyal harga, investasi infrastruktur, dukungan teknologi, dan perlindungan sosial. Dengan kerangka tersebut, pengurangan subsidi bukan semata agenda penghematan, melainkan perubahan struktur insentif menuju ekonomi yang lebih efisien, bersih, dan berkeadilan.

27. Studi Kasus Analitis: Belanja Infrastruktur dan Jebakan Proyek Prestisius

Infrastruktur mempunyai daya tarik politik yang kuat karena hasilnya terlihat secara fisik dan mudah dikomunikasikan. Jalan, bendungan, bandara, pelabuhan, atau gedung publik menjadi simbol pembangunan. Namun justru karena visibilitas tersebut, proyek infrastruktur rentan dipilih berdasarkan prestise atau tekanan politik, bukan manfaat ekonomi. Proyek yang baik seharusnya dimulai dari masalah yang hendak diselesaikan, bukan dari keinginan membangun aset. Jika masalahnya adalah biaya logistik tinggi, pilihan kebijakan dapat berupa peningkatan jalan, digitalisasi pelabuhan, reformasi regulasi, perbaikan koneksi kereta, atau kombinasi beberapa intervensi. Analisis biaya-manfaat membantu membandingkan alternatif tersebut.

Kesalahan umum lainnya adalah mengabaikan biaya siklus hidup. Anggaran pembangunan sering tersedia, tetapi anggaran operasi dan pemeliharaan tidak memadai. Akibatnya, aset baru cepat mengalami penurunan kualitas dan pemerintah kemudian membayar biaya rehabilitasi yang jauh lebih tinggi. Disiplin fiskal seharusnya mensyaratkan bahwa setiap proyek baru memiliki rencana pendanaan operasi, pemeliharaan, dan penggantian aset. Dengan kata lain, keputusan investasi harus dinilai terhadap kewajiban fiskal yang diciptakan sepanjang umur proyek, bukan hanya nilai kontrak awal.

Kerja sama pemerintah dan badan usaha dapat membantu pembiayaan dan manajemen proyek, tetapi tidak menghilangkan biaya. PPP pada dasarnya memindahkan waktu dan struktur pembayaran. Jika risiko permintaan, konstruksi, atau pendapatan akhirnya dijamin pemerintah, kewajiban kontinjensi tetap harus dicatat dan diuji. Value for money menjadi prinsip utama: PPP dipilih jika pembagian risiko, keahlian, dan insentif swasta benar-benar menghasilkan biaya total yang lebih rendah atau kualitas lebih tinggi dibanding pengadaan tradisional. Menggunakan PPP hanya untuk membuat kewajiban tampak di luar neraca dapat menciptakan ilusi ruang fiskal.

Infrastruktur yang menyejahterakan juga harus dinilai dari inklusi. Jalan yang menghubungkan sentra produksi kecil ke pasar, internet yang menjangkau sekolah terpencil, sanitasi yang menurunkan penyakit, atau transportasi publik yang mengurangi biaya perjalanan pekerja dapat menghasilkan manfaat sosial tinggi meskipun tidak selalu memiliki pendapatan langsung. Karena itu, appraisal proyek publik tidak boleh hanya menggunakan arus kas finansial; manfaat waktu, kesehatan, produktivitas, keselamatan, lingkungan, dan pemerataan wilayah juga perlu dihitung.

28. Kerangka Pengukuran Kesejahteraan dalam Evaluasi APBN

Salah satu kelemahan diskusi anggaran adalah kecenderungan menggunakan indikator input sebagai ukuran keberhasilan. Publik sering mendengar besarnya anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau perlindungan sosial. Informasi tersebut penting, tetapi belum menjawab apakah masyarakat menjadi lebih sejahtera. Evaluasi APBN seharusnya menggunakan dashboard berjenjang. Tingkat pertama adalah input: berapa dana, tenaga, dan aset yang digunakan. Tingkat kedua adalah output: berapa sekolah diperbaiki, berapa pasien dilayani, berapa kilometer jalan berfungsi, atau berapa keluarga menerima bantuan. Tingkat ketiga adalah outcome: apakah hasil belajar meningkat, angka kematian turun, biaya logistik berkurang, kemiskinan menurun, dan ketahanan rumah tangga membaik.

Tingkat keempat adalah dampak distribusional. Program dengan outcome rata-rata yang baik dapat tetap tidak adil jika manfaat terkonsentrasi di kota besar atau kelompok mampu. Karena itu, indikator perlu dipecah menurut wilayah, kelompok pendapatan, gender, usia, disabilitas, dan karakteristik relevan lainnya. Benefit-incidence analysis dan fiscal-incidence analysis membantu menilai siapa yang membayar dan siapa yang menerima manfaat. Pendekatan ini penting bagi Indonesia karena variasi kapasitas daerah sangat besar. Rata-rata nasional dapat menutupi kesenjangan pelayanan yang serius.

Tingkat kelima adalah keberlanjutan. Suatu program dapat meningkatkan kesejahteraan hari ini tetapi menciptakan kewajiban yang tidak dapat dibiayai di masa depan. Sebaliknya, investasi iklim atau pendidikan mungkin memiliki biaya besar sekarang namun menghasilkan manfaat jangka panjang yang tidak terlihat dalam satu tahun anggaran. Oleh sebab itu, evaluasi perlu memasukkan horizon waktu dan discounting yang wajar. Untuk isu antargenerasi, analisis juga perlu mempertimbangkan aset yang diwariskan—baik infrastruktur, human capital, maupun kualitas lingkungan—bersama kewajiban utang dan komitmen belanja.

Akhirnya, indikator kesejahteraan perlu dihubungkan dengan pengambilan keputusan. Data yang hanya dipublikasikan setelah program selesai memiliki nilai belajar, tetapi lebih kuat jika digunakan untuk menentukan alokasi tahun berikutnya. Kementerian dan daerah perlu memiliki ruang untuk menghentikan aktivitas yang tidak efektif tanpa takut bahwa pengurangan penyerapan akan otomatis dianggap kegagalan. Budaya anggaran harus bergeser dari 'habiskan pagu' menuju 'hasilkan dampak'. Perubahan ini mungkin lebih sulit daripada reformasi teknis karena menyentuh insentif birokrasi, sistem penilaian kinerja, dan hubungan politik.

29. APBN, Produktivitas, dan Pertumbuhan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi memperluas basis fiskal, tetapi hubungan antara pertumbuhan dan kesejahteraan tidak otomatis. Pertumbuhan yang bertumpu pada sektor padat modal dengan keterkaitan domestik rendah dapat meningkatkan PDB tanpa menciptakan cukup pekerjaan berkualitas. APBN dapat memengaruhi struktur pertumbuhan melalui investasi manusia, infrastruktur, insentif, riset, dan pengadaan pemerintah. Tantangannya adalah menghindari kebijakan industri atau insentif yang hanya memindahkan keuntungan kepada perusahaan tanpa additionality. Setiap insentif pajak seharusnya dievaluasi sebagai tax expenditure: berapa penerimaan yang dikorbankan, perilaku apa yang berubah, berapa investasi atau pekerjaan tambahan yang tercipta, dan apakah manfaatnya melebihi biaya.

Produktivitas merupakan jembatan antara disiplin fiskal dan pembangunan. Jika belanja publik meningkatkan produktivitas, basis pajak di masa depan membesar sehingga pembiayaan menjadi lebih mudah. Pendidikan yang lebih baik meningkatkan kualitas tenaga kerja; infrastruktur mengurangi biaya transaksi; kesehatan mengurangi hari kerja yang hilang; riset meningkatkan kemampuan inovasi; dan administrasi digital mengurangi biaya kepatuhan. Karena itu, konsolidasi fiskal yang memotong investasi produktif dapat

kontraproduktif. Sebaliknya, disiplin yang mengalihkan dana dari subsidi regresif atau program berdaya guna rendah menuju investasi produktif dapat memperkuat pertumbuhan sekaligus kesehatan fiskal.

Pertumbuhan inklusif menuntut perhatian pada akses. Infrastruktur digital tidak inklusif bila desa tidak memiliki koneksi atau masyarakat tidak memiliki keterampilan. Pendidikan tinggi tidak inklusif bila kualitas sekolah dasar menentukan kesempatan masuk jauh sebelum seleksi perguruan tinggi. Kredit usaha tidak inklusif bila pelaku kecil tidak memiliki catatan transaksi, jaminan, atau pendampingan. APBN dapat membiayai public goods yang menurunkan hambatan tersebut. Dalam konteks ini, pemerataan bukan lawan dari efisiensi; akses yang lebih luas pada pendidikan, kesehatan, dan pasar justru dapat memperbesar jumlah warga yang berkontribusi produktif pada ekonomi.

Pemerintah juga perlu membedakan dukungan temporer dan dukungan permanen. Ketika sektor mengalami guncangan eksternal, bantuan temporer dapat menjaga kapasitas produktif agar tidak hilang. Namun proteksi permanen terhadap perusahaan atau sektor yang tidak kompetitif dapat menurunkan produktivitas nasional. Disiplin fiskal menuntut sunset clause, target kinerja, dan evaluasi independen untuk berbagai insentif. Kebijakan yang berhasil dapat diperluas; yang gagal harus dapat dihentikan. Mekanisme ini membantu APBN menjadi portofolio investasi publik yang dinamis.

30. Agenda Kelembagaan: Dari Anggaran Tahunan menuju Negara yang Belajar

Reformasi APBN pada akhirnya adalah reformasi kelembagaan. Sistem yang baik tidak bergantung pada satu menteri, satu kabinet, atau satu periode politik. Ia menciptakan aturan, data, kompetensi, dan insentif yang membuat keputusan berkualitas lebih mungkin terjadi secara konsisten. Kerangka fiskal jangka menengah, fiscal risk statement, spending review, appraisal proyek, evaluasi dampak, dan open budget adalah bagian dari arsitektur tersebut. Namun alat teknis hanya efektif bila organisasi memiliki budaya yang menerima bukti, mengakui kegagalan, dan bersedia mengubah program.

Negara yang belajar memperlakukan kebijakan sebagai hipotesis yang perlu diuji. Program percontohan dapat digunakan sebelum skala nasional; desain dapat dibandingkan antarwilayah; data administratif dapat dikaitkan dengan survei; dan hasil evaluasi dipublikasikan. Dalam pendekatan ini, kegagalan program kecil yang terdeteksi awal lebih baik daripada kegagalan nasional yang dipertahankan karena biaya politik. APBN menyediakan mekanisme untuk melakukan pembelajaran tersebut apabila proses penganggaran memberi ruang pada eksperimen, evaluasi, dan realokasi.

Kapasitas SDM fiskal juga perlu berkembang. Pengelolaan APBN modern memerlukan ekonom, akuntan, ahli kebijakan publik, data scientist, spesialis pengadaan, ahli risiko, ilmuwan perilaku, dan profesional sektor. Kementerian Keuangan tidak dapat sendirian; setiap kementerian dan pemerintah daerah memerlukan kemampuan menerjemahkan tujuan pembangunan menjadi program yang dapat diukur. Perguruan tinggi dapat berperan melalui evaluasi independen, pengembangan metodologi, pelatihan, dan penyediaan ruang dialog kebijakan yang tidak terjebak kepentingan jangka pendek.

Pada akhirnya, kualitas APBN sangat bergantung pada kualitas demokrasi dan administrasi. Transparansi tanpa kapasitas analitis dapat menghasilkan banjir data tetapi sedikit akuntabilitas; partisipasi tanpa informasi dapat berubah menjadi kompetisi tuntutan; aturan tanpa integritas dapat diakali. Karena itu, reformasi fiskal harus ditempatkan dalam agenda yang lebih luas: profesionalisme birokrasi, supremasi hukum, integritas pengadaan, keterbukaan data, kebebasan akademik, dan pengawasan publik. APBN yang menyejahterakan lahir dari institusi yang mampu mengubah uang publik menjadi kepercayaan dan kemampuan kolektif.

31. Perspektif Antargenerasi: Siapa Membayar Pembangunan Hari Ini?

Kebijakan fiskal selalu mempunyai dimensi antargenerasi karena keputusan hari ini memengaruhi kapasitas fiskal, kualitas aset, dan peluang ekonomi di masa depan. Ketika pemerintah membangun infrastruktur, membiayai pendidikan, atau melakukan konservasi lingkungan, manfaatnya dapat dinikmati selama puluhan tahun. Dalam kasus demikian, penggunaan pembiayaan utang dapat masuk akal karena biaya dibagi dengan generasi yang juga menikmati manfaat. Namun prinsip ini menuntut disiplin: utang seharusnya lebih banyak membiayai aset dan kapasitas jangka panjang daripada konsumsi yang manfaatnya segera habis. Jika generasi mendatang mewarisi kewajiban tanpa aset produktif, maka kebijakan hari ini telah memindahkan beban secara tidak adil.

Perspektif antargenerasi juga menuntut perhatian pada kualitas lingkungan. Deforestasi, degradasi tanah, pencemaran, dan emisi karbon dapat meningkatkan pendapatan atau penerimaan jangka pendek tetapi menciptakan biaya ekologis dan fiskal yang panjang. APBN perlu menginternalisasi biaya tersebut melalui instrumen fiskal, regulasi, dan investasi adaptasi. Green budgeting dan climate budget tagging membantu mengidentifikasi apakah belanja publik mendukung atau justru bertentangan dengan tujuan iklim. Akan tetapi, penandaan anggaran hanya langkah awal; pemerintah tetap perlu menilai efektivitas nyata dari belanja tersebut.

Penuaan penduduk memberi contoh lain. Ketika proporsi lansia meningkat, kebutuhan pensiun, kesehatan kronis, dan layanan perawatan akan membesar. Jika skema manfaat tidak didukung basis iuran dan pajak yang memadai, kewajiban implisit dapat menjadi tekanan fiskal. Karena itu, proyeksi jangka panjang harus menjadi bagian dari diskusi APBN. Kebijakan ketenagakerjaan, produktivitas, kesehatan preventif, dan sistem pensiun perlu dirancang sejak dini agar transisi demografi tidak berubah menjadi krisis fiskal.

Prinsip antargenerasi akhirnya menuntut neraca yang lebih luas daripada APBN tahunan. Negara harus menanyakan apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya: utang, tetapi juga jalan, sekolah, kapasitas digital, kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, institusi, dan pengetahuan. Disiplin fiskal yang hanya berfokus pada defisit tahun berjalan dapat mengabaikan investasi penting; sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan kewajiban masa depan dapat menimbulkan beban yang tidak terlihat. Kebijakan yang baik menjaga keduanya dalam satu kerangka.

32. APBN dan Ketahanan Pangan-Energi: Mengelola Risiko Sistemik

Pangan dan energi memiliki karakter khusus karena kenaikan harganya langsung memengaruhi inflasi, kemiskinan, biaya produksi, dan stabilitas sosial. APBN sering menjadi garis pertahanan ketika harga komoditas global melonjak atau pasokan domestik terganggu. Namun ketergantungan pada subsidi dan operasi stabilisasi jangka pendek dapat menguras anggaran tanpa mengatasi akar masalah. Ketahanan pangan membutuhkan irigasi, riset benih, logistik, penyimpanan, informasi harga, akses pembiayaan, dan diversifikasi produksi. Ketahanan energi membutuhkan diversifikasi sumber, jaringan yang andal, efisiensi energi, serta investasi pada energi terbarukan dan penyimpanan.

Pendekatan fiskal yang kuat memisahkan tiga tujuan: melindungi konsumen rentan, menjaga kesinambungan pasokan, dan membangun kapasitas produksi jangka panjang. Ketiga tujuan ini membutuhkan instrumen berbeda. Perlindungan konsumen dapat menggunakan transfer terarah; kesinambungan pasokan memerlukan cadangan strategis dan manajemen logistik; sedangkan kapasitas produksi membutuhkan investasi dan reformasi regulasi. Menyatukan semuanya dalam subsidi harga sering membuat tujuan tidak jelas dan evaluasi sulit.

Ketahanan pangan-energi juga berkaitan dengan risiko iklim dan geopolitik. El Niño, banjir, kekeringan, konflik internasional, atau gangguan pelayaran dapat memengaruhi harga secara cepat. APBN perlu memiliki mekanisme kontinjensi yang memungkinkan respons tanpa harus melakukan realokasi yang merusak program prioritas. Pengadaan cadangan, asuransi pertanian, early warning system, dan perjanjian pasokan dapat dipandang sebagai premi untuk mengurangi volatilitas fiskal dan sosial.

Dalam jangka panjang, kebijakan pangan dan energi harus dinilai dari produktivitas dan keberlanjutan. Harga murah yang dipertahankan secara artifisial dapat menunda inovasi dan efisiensi. Sebaliknya, reformasi yang terlalu cepat tanpa perlindungan sosial dapat menimbulkan beban berat bagi rumah tangga miskin. APBN perlu mengelola transisi: mengurangi distorsi secara bertahap, menyalurkan dukungan kepada kelompok yang membutuhkan, dan menggunakan ruang fiskal untuk membangun sistem yang lebih tahan guncangan.

33. Hubungan Fiskal Pusat-Daerah dan Mutu Layanan Publik

Desentralisasi menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana utama banyak layanan yang paling dekat dengan warga. Sekolah dasar, puskesmas, jalan lokal, air bersih, pengelolaan sampah, dan berbagai perizinan bergantung pada kapasitas daerah. Karena itu, keberhasilan APBN tidak dapat dipisahkan dari APBD. Transfer ke daerah bukan sekadar pembagian uang, melainkan instrumen untuk menyamakan kapasitas pelayanan dan memberi insentif pada kinerja. Daerah dengan basis pajak lemah tetap harus mampu menyediakan standar minimum layanan publik.

Tantangan utama adalah heterogenitas kapasitas. Sebagian daerah memiliki kemampuan perencanaan, pengadaan, dan data yang kuat; daerah lain menghadapi keterbatasan SDM dan tata kelola. Desain transfer yang terlalu kompleks dapat membebani daerah lemah, sementara transfer tanpa syarat kinerja dapat mengurangi insentif perbaikan. Solusinya membutuhkan kombinasi: formula pemerataan yang transparan, bantuan teknis, indikator layanan yang sederhana tetapi bermakna, serta ruang inovasi lokal.

Kualitas belanja daerah juga dipengaruhi fragmentasi program pusat. Ketika berbagai kementerian memiliki program dan sistem pelaporan sendiri di wilayah yang sama, pemerintah daerah dapat menghadapi tumpang tindih prioritas. Pendekatan berbasis wilayah dan outcome dapat memperkuat koordinasi. Misalnya, penurunan stunting membutuhkan air bersih, gizi, kesehatan ibu-anak, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Anggaran sektor yang berdiri sendiri tidak cukup; diperlukan konvergensi program dan data pada sasaran rumah tangga serta wilayah yang sama.

Akuntabilitas daerah perlu dibangun kepada dua arah: vertikal kepada pemerintah pusat dan horizontal kepada masyarakat lokal. Publikasi APBD yang mudah dipahami, dashboard layanan, forum warga, dan audit kinerja dapat memperkuat tekanan untuk menggunakan dana secara efektif. Desentralisasi akan menghasilkan kesejahteraan apabila kedekatan pemerintah dengan warga berubah menjadi informasi yang lebih baik dan respons yang lebih cepat, bukan sekadar memperbanyak pusat-pusat rente.

34. Sintesis: Sepuluh Pertanyaan untuk Menilai Setiap Program APBN

Untuk menerjemahkan seluruh pembahasan menjadi alat praktis, setiap program APBN dapat diuji dengan sepuluh pertanyaan. Pertama, masalah publik apa yang hendak diselesaikan dan apakah masalah itu cukup penting untuk memerlukan intervensi pemerintah? Kedua, apa bukti bahwa instrumen yang dipilih dapat bekerja? Ketiga, siapa penerima manfaat dan siapa yang menanggung biaya? Keempat, apakah terdapat alternatif yang lebih murah atau lebih efektif? Kelima, bagaimana program diukur dari input sampai outcome? Pertanyaan-pertanyaan ini mencegah anggaran menjadi daftar kegiatan tanpa logika perubahan.

Pertanyaan keenam adalah apakah program menciptakan kewajiban jangka panjang dan bagaimana kewajiban itu akan dibiayai. Ketujuh, risiko apa yang dapat membuat biaya membengkak atau manfaat gagal tercapai? Kedelapan, apakah program tumpang tindih dengan program lain atau dapat digabungkan? Kesembilan, bagaimana mekanisme transparansi, pengaduan, audit, dan evaluasinya? Kesepuluh, apa kriteria untuk memperbesar, memperbaiki, atau menghentikan program? Dengan pertanyaan terakhir ini, program tidak dianggap memiliki hak hidup permanen hanya karena pernah dimasukkan ke dalam APBN.

Sepuluh pertanyaan tersebut dapat diterapkan pada program besar maupun kecil. Pada subsidi, misalnya, pertanyaan distribusi dan alternatif menjadi penting. Pada proyek infrastruktur, biaya siklus hidup dan risiko konstruksi menjadi dominan. Pada pendidikan, ukuran outcome dan waktu manfaat menjadi kunci. Pada insentif pajak, pemerintah perlu mengukur *additionality* dan *tax expenditure*. Pada perlindungan sosial, akurasi data serta kemampuan merespons guncangan menjadi pusat perhatian. Kerangka yang sama memungkinkan pembuat kebijakan membandingkan program yang berbeda dengan prinsip yang konsisten.

Jika kerangka ini digunakan secara disiplin, APBN dapat berfungsi sebagai mesin pembelajaran nasional. Setiap tahun bukan hanya mengulangi struktur lama dengan angka yang lebih besar, tetapi menjadi kesempatan untuk menguji apakah prioritas masih relevan, apakah instrumen masih efektif, dan apakah risiko baru telah muncul. Di sinilah disiplin fiskal bertemu dengan tuntutan pembangunan: negara membelanjakan secara cukup karena berani menetapkan prioritas, dan membelanjakan secara hati-hati karena setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat serta generasi mendatang.

35. Kredibilitas Fiskal, Suku Bunga, dan Kepercayaan Investor

Kredibilitas fiskal memiliki nilai ekonomi yang nyata karena memengaruhi biaya pembiayaan pemerintah dan persepsi risiko terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika investor percaya bahwa pemerintah memiliki strategi penerimaan, belanja, dan utang yang konsisten, premi risiko dapat lebih rendah dan pasar surat berharga negara menjadi lebih dalam. Sebaliknya, kebijakan yang sering berubah, target yang tidak realistis, atau kewajiban tersembunyi dapat meningkatkan ketidakpastian. Dampaknya tidak berhenti pada pemerintah; biaya dana yang lebih tinggi dapat menyebar ke sektor perbankan dan perusahaan karena surat utang pemerintah menjadi *benchmark* bagi harga aset keuangan lain.

Namun kredibilitas tidak identik dengan kebijakan fiskal yang selalu ketat. Pemerintah yang kredibel justru dapat memiliki ruang lebih besar untuk melakukan ekspansi ketika krisis karena pasar percaya bahwa ekspansi tersebut temporer dan akan diikuti normalisasi. Dengan kata lain, reputasi dibangun pada masa normal dan digunakan pada masa darurat. Ini menjelaskan mengapa disiplin fiskal perlu dipahami secara siklikal dan jangka menengah. Negara yang menekan defisit pada saat ekonomi lemah tanpa alasan kuat dapat memperburuk resesi, sedangkan negara yang terus berekspansi ketika ekonomi kuat dapat kehilangan ruang ketika guncangan datang.

Komunikasi fiskal menjadi bagian penting dari kredibilitas. Pemerintah perlu menjelaskan asumsi pertumbuhan, harga komoditas, nilai tukar, suku bunga, penerimaan, dan belanja secara terbuka, termasuk risiko bila asumsi berubah. Publikasi skenario alternatif dan sensitivitas membantu masyarakat memahami bahwa proyeksi bukan janji pasti, melainkan estimasi berdasarkan kondisi tertentu. Transparansi ini juga memperkecil kecenderungan menilai pemerintah semata dari perbedaan antara angka awal dan realisasi tanpa memperhatikan perubahan lingkungan ekonomi.

Bagi Indonesia, kedalaman pasar SBN domestik, basis investor yang beragam, dan manajemen jatuh tempo merupakan aset penting. Strategi utang perlu menghindari konsentrasi refinancing dan eksposur berlebihan pada valuta asing. Pengelolaan kas yang baik juga dapat mengurangi kebutuhan penerbitan yang tidak perlu.

Semua ini menunjukkan bahwa kesehatan fiskal bukan hanya soal jumlah utang, tetapi juga struktur, tenor, bunga, mata uang, kepemilikan, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan melalui kebijakan yang dapat diprediksi.

36. Ekonomi Politik Penerimaan: Membangun Kepatuhan dan Legitimasi Pajak

Pajak bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga hubungan politik antara warga dan negara. Kepatuhan dipengaruhi oleh tarif dan penegakan, namun juga oleh persepsi keadilan, kualitas layanan, serta keyakinan bahwa orang lain juga membayar. Sistem yang dianggap memberi perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu akan melemahkan moral pajak bahkan bila administrasinya modern. Karena itu, perluasan basis pajak perlu disertai transparansi mengenai pengecualian, insentif, dan tax expenditure. Setiap fasilitas fiskal sebaiknya memiliki tujuan, durasi, dan evaluasi yang jelas.

Digitalisasi administrasi dapat mengurangi biaya kepatuhan dan meningkatkan kemampuan analitik, tetapi transisi harus dikelola hati-hati. Sistem baru yang tidak stabil, proses yang rumit, atau integrasi data yang buruk dapat menambah beban wajib pajak dan menurunkan kepercayaan. Reformasi teknologi karena itu perlu ditemani simplifikasi proses dan dukungan pengguna. Tujuan akhirnya bukan mengumpulkan data sebanyak mungkin, melainkan membuat kepatuhan lebih mudah bagi yang patuh dan penghindaran lebih sulit bagi yang tidak patuh.

Keadilan pajak juga memiliki dimensi struktur ekonomi. Negara dengan sektor informal besar sulit mengandalkan pajak penghasilan individu seperti negara maju. PPN memiliki basis luas dan efisien, tetapi dapat bersifat regresif jika tidak dikompensasi melalui transfer atau pengecualian yang tepat. Pajak properti, pajak lingkungan, cukai, dan penguatan PPh dapat melengkapi struktur penerimaan. Desain yang baik mempertimbangkan administrability: pajak yang secara teori ideal belum tentu efektif jika biaya pemungutan dan pengawasannya tinggi.

Dalam jangka panjang, legitimasi pajak dibangun melalui hubungan timbal balik. Warga yang melihat sekolah, jalan, layanan kesehatan, keamanan, dan administrasi yang membaik lebih mungkin menerima kewajiban pajak. Oleh karena itu, reformasi penerimaan dan reformasi belanja tidak boleh dipisahkan. Peningkatan tax ratio yang berkelanjutan memerlukan negara yang mampu menunjukkan bahwa tambahan penerimaan dikonversi menjadi nilai publik yang nyata.

37. Kesimpulan Besar: APBN sebagai Arsitektur Kesejahteraan

Dari seluruh pembahasan dapat ditarik satu kesimpulan besar: APBN adalah arsitektur kesejahteraan. Ia menentukan fondasi pelayanan publik, jaring pengaman sosial, kapasitas investasi, daya tahan terhadap krisis, dan arah transformasi ekonomi. Karena itu, kualitas APBN tidak boleh direduksi menjadi apakah defisit berada di bawah suatu angka atau apakah penyerapan mendekati seratus persen. Indikator tersebut penting, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas mengenai manfaat, distribusi, risiko, dan keberlanjutan.

Disiplin fiskal diperlukan karena sumber daya terbatas dan kepercayaan mudah hilang. Akan tetapi, disiplin terbaik bukan disiplin yang mengecilkan peran negara secara mekanis. Disiplin terbaik adalah kemampuan membedakan kebutuhan dan keinginan, investasi dan pemborosan, perlindungan dan distorsi, bantuan temporer dan kewajiban permanen. Dengan disiplin seperti itu, pemerintah justru memperoleh ruang untuk bertindak lebih berani pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi, perlindungan sosial, dan adaptasi iklim.

Tuntutan pembangunan akan terus meningkat seiring aspirasi masyarakat, perubahan demografi, digitalisasi, urbanisasi, geopolitik, dan perubahan iklim. APBN tidak mungkin memenuhi semuanya melalui ekspansi belanja tanpa batas. Solusi terletak pada produktivitas fiskal: memperbesar hasil dari setiap rupiah, memperkuat basis penerimaan, mengurangi kebocoran, menghapus program yang tidak efektif, serta membangun institusi yang mampu belajar. Reformasi ini mungkin tidak sepopuler program baru, tetapi justru menentukan apakah program baru dapat bertahan.

Pada akhirnya, kesejahteraan fiskal adalah keseimbangan dinamis. Negara harus menjaga stabilitas hari ini tanpa mengorbankan investasi masa depan; membantu kelompok rentan tanpa menciptakan ketergantungan; membangun infrastruktur tanpa menumpuk aset yang tidak terpelihara; menggunakan utang tanpa mewariskan beban kosong; dan memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan hak warga. APBN yang berhasil adalah APBN yang mampu mengelola ketegangan-ketegangan tersebut secara transparan, berbasis bukti, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

38. Roadmap Reformasi Fiskal 2026–2030

Roadmap reformasi fiskal menuju 2030 perlu disusun sebagai urutan perubahan yang saling menguatkan. Tahap pertama adalah membangun fondasi informasi. Pemerintah memerlukan data penerimaan, belanja, aset, kewajiban, penerima manfaat, dan outcome yang dapat dihubungkan secara konsisten. Tanpa fondasi tersebut, reformasi mudah berubah menjadi penyesuaian administratif yang tidak menyentuh masalah inti. Integrasi data harus dibarengi standardisasi definisi, metadata, mekanisme koreksi, perlindungan privasi, dan akuntabilitas akses. Data yang berkualitas memungkinkan pemerintah membedakan program yang efektif dan tidak efektif, mengidentifikasi kebocoran, menilai insentif pajak, serta memperbaiki targetting perlindungan sosial.

Tahap kedua adalah memperkuat kapasitas penerimaan. Fokus utama bukan sekadar menaikkan tarif, tetapi memperluas basis dan meningkatkan kepatuhan melalui administrasi yang sederhana, digital, dan kredibel. Tax expenditure perlu dilaporkan secara lebih sistematis agar insentif dapat dibandingkan dengan belanja langsung. PNBP, khususnya yang terkait sumber daya alam, perlu dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan volatilitas. Sebagian penerimaan yang sangat sensitif terhadap harga komoditas sebaiknya tidak menjadi dasar bagi komitmen belanja permanen. Dengan demikian, struktur pendapatan menjadi lebih stabil dan kemampuan negara membiayai prioritas meningkat.

Tahap ketiga adalah reformasi kualitas belanja. Spending review perlu menjadi proses reguler yang terhubung dengan penyusunan pagu. Program besar harus memiliki teori perubahan, baseline, target outcome, dan strategi evaluasi. Pemerintah juga perlu memperkuat manajemen aset dan pemeliharaan sehingga investasi lama tidak kehilangan nilai. Pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, reformasi harus menekankan kualitas layanan dan akurasi sasaran. Pada infrastruktur, appraisal dan biaya siklus hidup harus menjadi standar. Pada subsidi, pemerintah perlu menggeser secara bertahap dari dukungan harga universal menuju perlindungan yang lebih tepat sasaran bila sistem data memungkinkan.

Tahap keempat adalah memperkuat kerangka risiko dan pembiayaan. Pemerintah perlu mengembangkan stress test yang menguji dampak pertumbuhan lebih rendah, suku bunga lebih tinggi, pelemahan kurs, penurunan harga komoditas, bencana besar, serta kewajiban BUMN dan PPP. Strategi utang harus menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko melalui diversifikasi tenor, instrumen, dan investor. Pengembangan pasar keuangan domestik membantu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Instrumen hijau dapat diperluas jika benar-benar terhubung dengan proyek dan indikator lingkungan yang kredibel.

Tahap kelima adalah memperkuat federalisme fiskal dan kapasitas daerah. Transfer harus lebih erat dikaitkan dengan standar layanan dan outcome, namun desainnya tidak boleh terlalu rumit. Pemerintah pusat dapat menyediakan platform data, standar pengadaan, bantuan teknis, dan benchmark biaya, sementara daerah diberi ruang menyesuaikan implementasi. Daerah yang berhasil memperbaiki layanan dengan efisien dapat memperoleh insentif, sedangkan masalah kronis perlu ditangani dengan pendampingan dan koreksi tata kelola. Pendekatan ini menggabungkan pemerataan nasional dengan inovasi lokal.

Tahap keenam adalah membangun institusi evaluasi dan komunikasi. DPR, BPK, kementerian, perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat sipil perlu memiliki akses pada informasi yang cukup untuk menilai kebijakan. Evaluasi independen seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme pembelajaran. Pemerintah juga perlu menyajikan informasi fiskal dalam bahasa yang dapat dipahami publik: berapa biaya program, siapa penerima manfaat, apa hasilnya, dan apa trade-off-nya. Literasi fiskal yang lebih baik mengurangi ruang bagi klaim populis bahwa semua kebutuhan dapat dipenuhi tanpa pilihan yang sulit.

Tahap ketujuh adalah mengembangkan perspektif 2030 dan antargenerasi. Setiap APBN tahunan perlu menunjukkan bagaimana kebijakan saat ini berkontribusi terhadap sasaran jangka menengah: produktivitas, pengurangan kemiskinan, peningkatan human capital, transformasi energi, ketahanan iklim, digitalisasi, dan pemerataan wilayah. Dengan kerangka ini, belanja tahun berjalan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan. Kedisiplinan fiskal kemudian memperoleh makna strategis: menjaga agar negara tetap memiliki pilihan di masa depan.

Roadmap tersebut membutuhkan kepemimpinan yang konsisten karena banyak reformasi fiskal menimbulkan biaya politik jangka pendek sementara manfaatnya muncul kemudian. Pengurangan insentif yang tidak efektif, reformasi subsidi, penghentian program lemah, atau peningkatan kepatuhan pajak akan menghadapi resistensi. Karena itu, reformasi perlu disertai bukti, konsultasi, kompensasi bagi kelompok terdampak, dan komunikasi yang terbuka. Tujuannya bukan mengejar angka fiskal yang indah, melainkan membangun kapasitas negara untuk menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan. Apabila prinsip ini dijaga, Indonesia dapat menjadikan APBN bukan sekadar instrumen tahunan, tetapi platform transformasi menuju negara berpendapatan tinggi yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan.

39. Epilog: APBN, Kepercayaan, dan Masa Depan Negara

APBN pada akhirnya adalah cermin kemampuan negara mengorganisasikan sumber daya bersama. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai pajak, utang, pelayanan publik, investasi, subsidi, transfer, dan perlindungan sosial. Namun di balik angka-angka itu terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara dipercaya, apakah kebijakan dianggap adil, dan apakah masyarakat melihat hubungan antara kontribusi yang mereka berikan dan manfaat yang mereka terima. Kepercayaan ini memiliki konsekuensi ekonomi. Negara yang dipercaya lebih mudah membangun kepatuhan pajak, melaksanakan reformasi, dan memperoleh dukungan ketika harus mengambil kebijakan sulit.

Karena itu, disiplin fiskal perlu ditempatkan dalam etika tanggung jawab publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan berasal dari pajak masyarakat, penerimaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan bersama, atau utang yang akan dibayar di masa depan. Pengelolaannya menuntut kehati-hatian, transparansi, dan keberanian menghentikan program yang tidak lagi efektif. Pada saat yang sama, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk menunda investasi yang menentukan masa depan. Negara yang terlalu takut berinvestasi pada manusia, teknologi, infrastruktur, dan ketahanan iklim dapat meninggalkan generasi berikutnya dengan kapasitas yang lemah meskipun neraca fiskalnya terlihat rapi.

Dengan demikian, ukuran tertinggi APBN adalah kemampuan menciptakan pilihan yang lebih luas bagi warga: kesempatan belajar, hidup sehat, bekerja produktif, membangun usaha, berpindah secara aman, menghadapi guncangan, dan mewariskan lingkungan yang layak. Bila disiplin fiskal diarahkan pada tujuan tersebut, ia menjadi bagian dari pembangunan, bukan pembatasnya. Bila pembangunan dilaksanakan dengan disiplin seperti itu, ia menjadi berkelanjutan, bukan sekadar ekspansi anggaran. Sintesis inilah yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan APBN Indonesia menuju 2030 dan seterusnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, pembaruan APBN perlu dihubungkan dengan agenda produktivitas nasional. Indonesia memerlukan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu memperluas basis penerimaan, memperbaiki kualitas pekerjaan, dan mengurangi kerentanan rumah tangga. Hal ini menuntut konsistensi antara kebijakan fiskal, moneter, industri, pendidikan, ketenagakerjaan, energi, dan lingkungan. APBN tidak dapat sendirian menghasilkan transformasi, tetapi tanpa APBN yang berkualitas transformasi sulit dipertahankan. Karena itu, koordinasi kebijakan harus diarahkan pada tujuan bersama dan indikator yang dapat diuji. Pemerintah juga perlu menjaga kemampuan melakukan koreksi ketika kondisi berubah. Fleksibilitas yang berbasis aturan lebih sehat daripada perubahan mendadak yang didorong tekanan jangka pendek. Dengan institusi yang belajar, data yang terbuka, dan evaluasi yang serius, APBN dapat menjadi sarana untuk menyatukan disiplin, keberanian, dan keadilan dalam satu strategi pembangunan nasional.

Glossarium

APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR.

Automatic stabilizer: Komponen fiskal yang berubah otomatis mengikuti kondisi ekonomi, misalnya penerimaan pajak dan sebagian manfaat sosial.

Benefit incidence: Analisis mengenai kelompok masyarakat yang menerima manfaat akhir dari belanja atau subsidi publik.

Climate budget tagging: Penandaan anggaran yang mengidentifikasi belanja terkait mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.

Crowding-out: Kondisi ketika pembiayaan atau aktivitas pemerintah mengurangi ruang bagi investasi atau pembiayaan swasta.

Defisit anggaran: Selisih ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara pada suatu periode.

Fiscal multiplier: Besarnya perubahan output ekonomi yang dikaitkan dengan perubahan belanja atau pajak pemerintah.

Fiscal risk statement: Dokumen yang memetakan sumber risiko yang dapat memengaruhi posisi fiskal pemerintah.

Keseimbangan primer: Pendapatan dikurangi belanja selain pembayaran bunga utang.

Medium-Term Expenditure Framework: Kerangka pengeluaran jangka menengah yang menghubungkan anggaran tahunan dengan proyeksi multi-tahun.

Outcome-based budgeting: Penganggaran yang menekankan hasil kebijakan, bukan semata input dan penyerapan.

PNBP: Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Primary surplus: Kondisi ketika pendapatan lebih besar daripada belanja non-bunga.

Progressivitas pajak: Karakter sistem pajak di mana beban relatif meningkat seiring kemampuan membayar.

Public investment management: Sistem perencanaan, appraisal, seleksi, pengadaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi publik.

Shock absorber: Fungsi APBN untuk meredam dampak guncangan ekonomi atau sosial.

Spending review: Evaluasi sistematis terhadap belanja untuk menemukan ruang efisiensi, reprioritisasi, atau penghentian program.

Sunset clause: Ketentuan bahwa program atau fasilitas berakhir pada waktu tertentu kecuali dievaluasi dan diperpanjang.

Tax expenditure: Penerimaan pajak yang tidak dipungut karena insentif, pengecualian, pengurangan, atau perlakuan khusus.

Tax ratio: Rasio penerimaan pajak terhadap PDB, digunakan sebagai salah satu ukuran kapasitas fiskal.

TKD: Transfer ke Daerah, yaitu bagian belanja negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.

Value for money: Prinsip memperoleh kombinasi terbaik antara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari pengeluaran publik.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026a). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026b). Ekonomi Indonesia triwulan I-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y). BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026c). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. BPS.

Badan Pusat Statistik. (2026d). Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363. BPS.

Blesse, S., et al. (2026). Do fiscal rules undermine public investments? A review of the empirical evidence. *European Journal of Political Economy*, 102775. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2025.102775>

Causa, O., & Hermansen, M. (2019). Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries. *OECD Economics Department Working Papers*. <https://doi.org/10.1787/bc7569c6-en>

Ditha, M. D., Iqbal, M., & Zulaikah. (2025). Fiscal policy analysis on economic growth in Indonesia period 2010–2023 (VECM approach). *International Journal of Economics*, 4(2), 1223–1238. <https://doi.org/10.55299/ijec.v4i2.1424>

Immervoll, H., & Richardson, L. (2011). Redistribution policy and inequality reduction in OECD countries: What has changed in two decades? *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 122. <https://doi.org/10.1787/5kg5dlkhjq0x-en>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). APBN 2026: Motor menuju pertumbuhan berkelanjutan. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026a). APBN 2026 semakin solid, pendapatan negara tumbuh kuat. Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026b). APBN 2026 tetap sehat dukung pertumbuhan ekonomi. Kementerian Keuangan.

Lustig, N. (2015). Fiscal redistribution in middle income countries: Brazil, Chile, Colombia, Indonesia, Mexico, Peru and South Africa. *OECD Development Centre Working Papers*, No. 311. <https://doi.org/10.1787/5jrrwdt037mv-en>

- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
- World Bank. (2020a). Indonesia public expenditure review: Spending for better results. World Bank. <https://doi.org/10.1596/33954>
- World Bank. (2020b). Investing in people: Social protection for Indonesia's 2045 vision. World Bank.
- World Bank. (2024). Improving data quality for an effective social registry in Indonesia. World Bank.
- World Bank. (2017). Vietnam public expenditure review: Fiscal policies towards sustainability, efficiency, and equity. World Bank. <https://doi.org/10.1596/28610>

Catatan Sumber Data Mutakhir

Angka APBN 2026 mengacu pada publikasi resmi Kementerian Keuangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Data realisasi Semester I 2026 mengacu pada publikasi Kementerian Keuangan Juli 2026. Data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan mengacu pada rilis resmi Badan Pusat Statistik tahun 2026. Angka-angka dapat berubah pada publikasi realisasi berikutnya; karena itu, analisis kebijakan sebaiknya selalu dibaca bersama perkembangan APBN KiTa dan statistik resmi terbaru.